



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 170 / II TAHUN 2016

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2017

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR.

Menimbang

- a. bahwa Pembahasan Rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah telah dilaksanakan oleh Badan Legislasi Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 239 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2017;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara tanggal 5 Agustus 1950);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

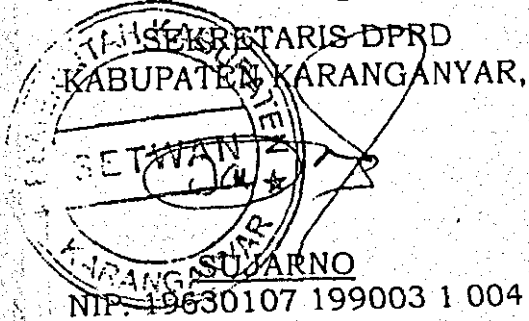
- Menetapkan
KESATU : Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2017 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 27 Oktober 2016

KETUA DPRD KABUPATEN KARANGANYAR,



Salinan sesuai dengan aslinya



SUJARNO
NIP. 19630107 199003 1 004

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN KARANGANYAR
 NOMOR 170/ // TAHUN 2016
 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN
 DAERAH TAHUN 2017

DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2017

NO (1)	JENIS (2)	TENTANG (3)	MATERI POKOK (4)	STATUS (5)		PELAKSANAAN (6)	DISERTAI (7)		UNIT/ INSTANSI TERKAIT (8)	TARGET PENYAMPAIAN (9)	KETERANGAN (10)
				BARU	UBAH		NA	Penjelasan/ Keterangan			
1.	Peraturan Daerah	Rumah Susun	1. Jenis Rumah Susun; 2. Perencanaan; 3. Pembangunan; 4. Sertifikat laik Fungsi; 5. Penguasaan, Pemilikan dan Pemanfaatan; 6. Pengelolaan; 7. Pengendalian.	Baru		2017	NA		1. Inspektorat 2. Satpol PP 3. DPU (SKPD Pemrakarsa) 4. BPN 5. Bagian Hukum Setda	April 2017	UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2.	Peraturan Daerah	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan	Perubahan persyaratan dan penghapusan ketentuan daftar ulang		Ubah	2017	Penjelasan	1. Inspektorat 2. Satpol PP 3. BPMPTSP (SKPD Pemrakarsa) 4. Badan Lingkungan Hidup 5. Bagian Hukum Setda	April 2017	Permendagri No. 27 Tahun 2009 tentang pedoman peneta pan izin gangguan
3.	Peraturan Daerah	Barang Milik Daerah	1. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran; 2. Pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan; 3. Penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan; 4. Pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah.	Baru		2017	NA	1. Inspektorat 2. Satpol PP 3. DPPKAD (SKPD Pemrakarsa) 4. Bagian Hukum Setda.	April 2017	1. PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; 2. Permen-dagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4.	Peraturan Daerah	Perubahan atas Perda Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu	penghapusan ketentuan daftar ulang	Ubah	2017		Penjelasan	1. Inspektorat 2. Satpol PP 3. BPMPTSP (SKPD Pemrakarsa) 4. Bagian Hukum Setda.	April 2017	Permendagri No.- 27 Tahun 2009 tentang pedoman penetapan izin gangguan
5.	Peraturan Daerah	Hibah dan Bansos	1. Penganggaran; 2. pelaksanaan dan penatausahaan; 3. pelaporan dan pertanggungjawaban; 4. monitoring dan evaluasi.	Baru	2017	NA	1. Inspektorat 2. Satpol PP 3. DPPKAD (SKPD Pemrakarsa) Bagian Hukum Setda.	April 2017	1. PP No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Permendagri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									yang bersumber dari APBD
6.	Peraturan Daerah	Perubahan Kedua atas Perda Kabupaten Karanganyar No. 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha	Penyesuaian Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Ubah	2017	Penjelasan	1. Inspektorat 2. Satpol PP 3. DPPKAD 4. Bagian Umum Setda.(SKPD Pemrakarsa) 5. SKPD....(terkait)	April 2017	UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
7.	Peraturan Daerah	Perusahaan Daerah BPR Bank Daerah.	Perubahan badan usaha dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas.	Baru	2017	NA	1. Inspektorat 2. Satpol PP 3. Bagian Perekonomian Setda.(SKPD /Unit Pemrakarsa) 4. Bagian Hukum Setda.	April 2017	UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemda

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	Peraturan Daerah	Perusahaan Daerah BPR Bank Karanganyar	Perubahan badan usaha dari Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah.	Baru	2017	NA	1. Inspektorat 2. Satpol PP 3. Bagian Perekonomian Setda.(SKPD / Unit Pemrakarsa) 4. Bagian Hukum Setda.	April 2017	UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda
9.	Peraturan Daerah	Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karanganyar	1. Perubahan badan usaha dari Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah. 2. Perubahan modal dasar	Baru	2017	NA	1. Inspektorat 2. Satpol PP 3. Bagian Perekonomian Setda.(SKPD /Unit Pemrakarsa) 4. Bagian Hukum Setda.	April 2017	UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda

1	2	3	4	5	6	7	8	9	RI
10.	Peraturan Daerah	Air Limbah	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik	dan Baru	2017	NA	1. Inspektorat 2. Satpol PP 3. Badan Lingkungan Hidup (SKPD Pemrakarsa) 4. Bagian Hukum: Setda.	April 2017	UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan
11.	Peraturan Daerah	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kesetaraan Difabel	Penyesuaian dengan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas : 1. Penyesuaian definisi, Asas dan Tujuan Pelaksanaan, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan Hak Difabel; 2. Penambahan pengaturan pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.	Ubah	2017	Penjelasan	1. Inspektorat 2. Satpol PP 3. Dinsosaker trans. (SKPD Pemrakarsa) 4. Bagian Kesra Setda. 5. Bagian Hukum: Setda.	Agustus 2017	UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

1	2	3	4	5	6	7	8	9	ID
12.	Peraturan Daerah	Penyelenggaraan Perpustakaan	1. Standar Perpustakaan; 2. Koleksi dan layanan; 3. Kewajiban Pemerintah Daerah, pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan; 4. Jenis-jenis perpustakaan: tenaga pengelola perpustakaan dan pendidikan; 5. Sarana dan prasarana serta pendanaan 6. Sumber Daya Manusia. 7. Pembudayaan kegemaran membaca.	Baru	2017	NA	1. Inspektorat 2. Satpol PP 3. Kantor Perpustakaan dan Arsip. (SKPD Pemrakarsa) 4. Bagian Hukum Setda. 5. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga. 6. Bappeda. 7. Bagian Kesra.	Agustus 2017	1. UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan 2. PP No. 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.
13.	Peraturan Daerah	Pengelolaan Kearsipan	1. Sistem Kearsipan Daerah 2. Pengelolaan Arsip Dinamis dinamis In Aktif; 3. Pengelolaan Arsip Statis; 4. Penataan Berkas, Retensi Arsip; Pemusnahan Arsip; 5. Sarana dan Prasarana Kearsipan. 6. Kerjasama dan Peran serta masyarakat	Baru	2017	NA	1. Inspektorat 2. Satpol PP 3. Kantor Perpustakaan dan Arsip (SKPD Pemrakarsa) 4. Bagian Hukum Setda. 5. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga. 6. Bappeda. 7. DPPKAD	Agustus 2017	UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
14.	Peraturan Daerah	Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak	Hak Anak yang wajib dipenuhi	Baru	2017	NA	1. Inspektorat 2. Satpol PP 3. BP3AKB (SKPD Pemrakarsa) 4. Bagian Hukum Setda.	Agustus 2017	U-U No. 23 Tahun 2002 tentang Ferlindungan Anak

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	Peraturan Daerah	Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia	1. Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab; 2. Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia; 3. Kelembagaan dan Koordinasi; Peran Serta Masyarakat; 4. Sanksi Administrasi; Pembiayaan.	Baru	2017	NA	1. Inspektorat 2. Satpol PP 3. Dinsosna-kertrans (SKPD Pemrakarsa) 4. Bagian Kesra Setda. 5. Bagian Hukum Setda.	Agustus 2017	1. UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 2. PP 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
16.	Peraturan Daerah	Penyelenggaraan HAM	1. Pelaksanaan HAM; 2. Kabupaten Layak Ham; 3. Tugas, Peran dan Kewajiban; 4. Kerjasama dan Partisipasi Masyarakat; dan Pembiayaan.	Baru	2017	NA	1. Inspektorat 2. Satpol PP 3. Bagian Hukum Setda (SKPD/Unit Pemrakarsa)	Agustus 2017	UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	Peraturan Daerah	Bantuan Hukum Kepada masyarakat Miskin	1. Penyelenggaraan Bantuan Hukum; 2. Hak dan Kewajiban Penerima dan Pemberi Bantuan Hukum; 3. Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum; Pendanaan; 4. Larangan; dan Sanksi Administratif.	Baru	2017	NA	1. Inspektorat 2. Satpol PP 3. Bagian Hukum Setda (SKPD/ Unit Pemrakarsa)	Agustus 2017	1. UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum 2. PP No. 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

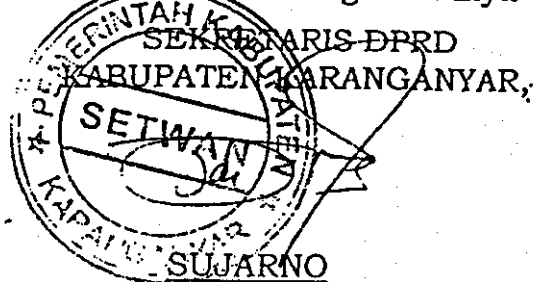
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	Peraturan Daerah	Pengembangan Produk UMKM	Pengembangan usaha berbasis potensi daerah yang mempunyai daya saing	Baru	2017	NA	DPRD	Oktober 2017	UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM
19.	Peraturan Daerah	Penanggulangan Kemiskinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlindungan dan Pemenuhan hak-hak warga miskin. 2. Upaya Penanggulangan kemiskinan. 	Baru	2017	NA	DPRD	Oktober 2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. 2. UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin 3. Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

DAFTAR RANCANGAN PERDA KUMULATIF TERBUKA

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	UBAH		NA	Penjelasan/Keterangan			
20.	Peraturan Daerah	Akibat Putusan Mahkamah Agung									
21.	Peraturan Daerah	APBD	a. APBD 2018 b. Pertanggungjawaban APBD 2016 c. Perubahan APBD 2017								

KETUA DPRD KABUPATEN KARANGANYAR,

Salinan sesuai dengan aslinya



NIP. 19630107 199003 1 004

